



Implikasi Pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani terhadap Pembaruan Pendidikan Islam

Zulfa Khairiah Ali^{1*}, Iefone Shiflana Habiba², Maragustam Siregar³

¹⁻³ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Email: zulfakhairiahali@gmail.com¹, Iefoneshiflana@gmail.com², maragustam@uin-suka.ac.id³

*Penulis Korespondensi: zulfakhairiahali@gmail.com

Abstract. *The notion of Pan-Islamism articulated by Jamaluddin al-Afghani in the latter half of the nineteenth century is commonly read as a political response to European colonial expansion into the Muslim world, while its pedagogical dimension remains under-examined. This article analyzes the conceptual implications of al-Afghani's Pan-Islamism for the reform of Islamic education at the philosophical, institutional, and curricular levels. Employing a qualitative library-research method with a historical-analytical approach, this study examines al-Afghani's primary writings and correspondence alongside recent secondary scholarship. The findings indicate that al-Afghani's Pan-Islamism is inseparable from an educational project demanding three fundamental shifts: deconstructing the dichotomy between religious and secular knowledge through the reopening of ijtihad; reorienting educational epistemology from rote-dogmatic learning toward rational-critical reasoning; and cultivating a consciousness of communal solidarity (ukhuwah islamiyah) as the basis for a transnational civic curriculum. These ideas found institutional expression in reformist educational establishments across Egypt, Turkey, India, and the Dutch East Indies. The study also identifies an inherent tension between al-Afghani's rational-modernist orientation and his solidarity rhetoric, which carries a risk of exclusivist misreading. It concludes that the relevance of Pan-Islamism for contemporary Islamic education lies not in the romanticism of political unity but in its ethos of open, critical, and adaptive epistemic reform.*

Keywords: *Ijtihad; Islamic Education; Islamic Reform Thought; Jamaluddin Al-Afghani; Pan-Islamism.*

Abstrak. Gagasan Pan-Islamisme yang dirumuskan Jamaluddin al-Afghani pada paruh akhir abad ke-19 lazim dipahami sebagai respons politik terhadap ekspansi kolonial Eropa atas dunia Islam, namun dimensi pedagogisnya belum banyak dieksplorasi secara sistematis. Artikel ini bertujuan menganalisis implikasi konseptual Pan-Islamisme al-Afghani terhadap pembaruan pendidikan Islam, baik pada tataran filosofis, kelembagaan, maupun kurikuler. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) bersifat historis-analitis, menelaah sumber primer berupa karya dan korespondensi al-Afghani serta sumber sekunder berupa kajian akademik terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pan-Islamisme al-Afghani tidak dapat dilepaskan dari proyek pendidikannya yang menuntut tiga pergeseran mendasar: pertama, dekonstruksi dikotomi ilmu agama dan ilmu umum melalui pembukaan kembali pintu ijtihad. kedua, reorientasi epistemologi pendidikan dari pendekatan hafalan-dogmatis menuju penalaran rasional-kritis, dan ketiga, pembentukan kesadaran solidaritas umat (ukhuwah islamiyah) sebagai basis kurikulum kewargaan transnasional. Implikasi gagasan ini tampak pada lembaga-lembaga pendidikan pembaruan di Mesir, Turki, India, dan Hindia Belanda yang mengadaptasi model integrasi sains modern dengan nilai keislaman. Namun, kajian ini juga mengidentifikasi ketegangan inheren dalam pemikiran al-Afghani antara orientasi modernis-rasional dan retorika solidaritas keagamaan yang berpotensi disalahtafsirkan secara eksklusivistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relevansi Pan-Islamisme bagi pendidikan Islam kontemporer terletak bukan pada romantisme persatuan politik, melainkan pada etos pembaruan epistemik yang terbuka, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kata Kunci: Ijtihad; Jamaluddin Al-Afghani; Pan-Islamisme; Pembaruan Pemikiran Islam; Pendidikan Islam.

1. LATAR BELAKANG

Pertengahan abad ke-19 menandai titik balik kesadaran politik dan intelektual dunia Islam ketika ekspansi kolonial Eropa militer, ekonomi, sekaligus epistemik menampilkan kesenjangan peradaban yang tajam antara Barat yang industrial-rasional dan dunia Islam yang dipersepsikan stagnan. (Black, 2006) Dalam konteks itulah Sayyid Jamaluddin al-Afghani (1838/1839–1897) muncul sebagai salah satu tokoh pembaru yang merumuskan diagnosis kemunduran umat Islam sekaligus menawarkan resep perlawanan, yang salah satu

artikulasinya paling dikenal adalah gagasan Pan-Islamisme. (Budiarti et al., 2026). PanIslamisme pada dasarnya merupakan proyek penyatuan kesadaran politik-keagamaan umat Islam lintas batas negara untuk menghadapi imperialisme Barat, bukan dalam arti peleburan kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu entitas politik, melainkan persatuan pandangan hidup dan solidaritas (ukhuwah islamiyah) di tengah fragmentasi umat. (Nasbi, 2019) Al-Afghani menyimpulkan bahwa kemunduran Islam bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, melainkan oleh taklid buta, tertutupnya pintu ijtihad, menjamurnya takhayul dan bid'ah, kesalahpahaman terhadap konsep qadha dan qadar yang melahirkan fatalisme, serta perpecahan internal umat. (Politea, 2023; Maryam, 2014)

Sebagian besar literatur mengenai al-Afghani menempatkan Pan-Islamisme semata sebagai wacana politik anti-kolonial, sementara dimensi pendidikannya cenderung diperlakukan sebagai catatan pinggir. (Black, 2006) Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian-kajian mutakhir, al-Afghani secara konsisten menegaskan bahwa kebangkitan politik umat Islam mustahil tercapai tanpa transformasi mendasar dalam sistem pendidikan khususnya pembukaan diri terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta penghapusan pendekatan hafalan yang kaku. (Ofiani & Mardalena, 2024) Dengan demikian, terdapat keterkaitan struktural antara visi politik Pan-Islamisme dan visi pedagogisnya tanpa reformasi epistemologi pendidikan, solidaritas politik umat hanya akan menjadi slogan tanpa daya dukung sumber daya manusia yang memadai.

Kesenjangan riset inilah yang melatari urgensi artikel ini. Penelitian terdahulu, seperti kajian Nasbi yang memetakan pokok-pokok pemikiran Pan-Islamisme al-Afghani, (Nasbi, 2019) kajian Ofiani dan Mardalena yang menyoroti relevansi pemikiran pendidikan al-Afghani dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, (Ofiani & Mardalena, 2024) maupun kajian Miswanto dkk. tentang aspek pembaruan dan reformasi pendidikan yang diusung al-Afghani bersama Muhammad Abduh, (Miswanto, Hitami, & Murhayati, 2023) umumnya bersifat deskriptif-biografis atau berfokus pada penerapannya di satu konteks kelembagaan tertentu. Artikel ini berupaya melampaui pendekatan tersebut dengan menyusun kerangka analitis yang menempatkan Pan-Islamisme sebagai konsep pedagogis berlapis filosofis, kelembagaan, dan kurikuler serta secara kritis mengidentifikasi ketegangan internal dalam pemikiran al-Afghani yang relevan dibaca ulang pada masa kini. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana basis filosofis Pan-Islamisme al-Afghani terkait dengan visinya tentang pendidikan Islam; (2) implikasi apa yang ditimbulkannya terhadap kelembagaan dan kurikulum pendidikan Islam pada masanya hingga warisannya di Nusantara; dan (3) sejauh mana relevansi serta keterbatasan gagasan tersebut

bila dibaca dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan analisis kritis-objektif yang tidak sekadar mengapresiasi al-Afghani sebagai pahlawan pembaru, tetapi juga menimbang implikasi ambivalen pemikirannya secara proporsional.

2. KAJIAN TEORITIS

Pan- Islamisme Sebagai Konstruksi Pemikiran Pembaharuan

Secara konseptual, Pan-Islamisme dapat didudukkan dalam tradisi pemikiran tajdid (pembaruan) Islam yang merespons stagnasi peradaban melalui dua gerak sekaligus, gerak ke dalam berupa purifikasi pemahaman keagamaan dari unsur jumud, taklid, dan khurafat, dan gerak ke luar berupa konsolidasi kekuatan kolektif umat menghadapi dominasi eksternal. (Black, 2006) Black menempatkan al-Afghani dalam genealogi pemikiran politik Islam sebagai figur transisional yang menjembatani teologi klasik dengan tuntutan modernitas politik, sebuah posisi yang menjadikan pemikirannya kerap ditafsirkan secara berbeda oleh kalangan modernis maupun fundamentalis di kemudian hari. (Black, 2006).

Tiga proposisi teoritis dapat diidentifikasi sebagai fondasi Pan-Islamisme al-Afghani. Pertama, tesis tentang non-inherensi kemunduran, keterbelakangan umat Islam bukan konsekuensi niscaya dari ajaran Islam, melainkan akibat distorsi historis dalam praktik keberagamaan dan keilmuan. (Politea, 2023; Nasbi, 2019) Argumentasi ini penting secara teoritis karena menggeser locus permasalahan dari ranah teologis-dogmatis ke ranah sosiologis-edukatif, sehingga solusi yang ditawarkan pun bersifat pedagogis, bukan sekadar ritual.

Kedua, tesis tentang keterbukaan ijtihad sebagai metode epistemologis. Al-Afghani memandang tertutupnya pintu ijtihad sebagai akar dari kemandekan intelektual, sehingga ia menawarkan pembukaan kembali ijtihad sebagai instrumen untuk merekonsiliasi teks keagamaan dengan tuntutan rasionalitas dan kemajuan ilmiah. (Shofi, Alfi, & Badi'ati, 2020) Pendekatan ini menempatkan akal (rasionalitas) bukan sebagai ancaman bagi wahyu, melainkan sebagai mitra metodologis dalam memahami maksud syariat secara kontekstual.

Ketiga, tesis tentang solidaritas transnasional (ukhuwah islamiyah) sebagai basis kesadaran kolektif. Persatuan yang dimaksud al-Afghani bukanlah penyatuan struktur kekuasaan politik, melainkan kesamaan cara pandang dan orientasi nilai di antara umat Islam lintas wilayah geografis, sebagai prasyarat sosial bagi keberhasilan proyek pembaharuan apa pun, termasuk pembaharuan pendidikan. (Nasbi, 2019). Dalam kerangka teori pendidikan, ketiga proposisi tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga komponen klasik kurikulum: tujuan (*aims*),

isi (*content*), dan metode (*method*). (Swartz, 2013) Tesis non-inherensi kemunduran menjadi premis filosofis bagi penetapan tujuan pendidikan yakni kebangkitan peradaban melalui ilmu, tesis ijtihad menjadi basis metodologis bagi pembelajaran yang menekankan penalaran kritis ketimbang hafalan; sementara tesis ukhuwah menjadi muatan nilai dalam isi kurikulum berupa kesadaran identitas kolektif yang inklusif. Kerangka tripartit inilah yang akan digunakan untuk menganalisis implikasi konkret Pan-Islamisme terhadap pendidikan Islam pada bagian berikut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kepustakaan (*library research*) dengan desain historis-analitis. (Zed, 2004) Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa gagasan dan teks pemikiran tokoh yang memerlukan penelusuran genealogis serta interpretasi kontekstual, bukan pengukuran empiris lapangan.

Sumber data dibagi menjadi dua kategori. Sumber primer meliputi terjemahan dan kompilasi tulisan, korespondensi, serta pidato al-Afghani sebagaimana didokumentasikan dalam karya biografis-historis seperti karya Keddie tentang riwayat politik al-Afghani (Keddie, 1972) dan karya Hamka yang mengulas pemikiran al-Afghani dalam konteks dunia Islam berbahasa Melayu-Indonesia. (Hamka, 1981) Sumber sekunder mencakup artikel jurnal terakreditasi nasional dan internasional terbitan lima belas tahun terakhir yang membahas Pan-Islamisme, pemikiran pendidikan Islam modern, serta penerapannya di berbagai konteks kelembagaan, termasuk Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pembacaan kritis dokumen, dengan tahapan: (1) inventarisasi sumber melalui basis data jurnal terindeks; (2) klasifikasi tematik berdasarkan dimensi filosofis, kelembagaan, dan kurikuler; (3) analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola argumen dan kontradiksi internal; serta (4) sintesis interpretatif untuk menyusun kerangka analitis implikasi pendidikan.

Analisis data menggunakan metode analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan historis-hermeneutis, yakni menafsirkan teks dalam kerangka konteks sosial-politik abad ke-19 sekaligus menilai relevansinya bagi diskursus pendidikan Islam kontemporer. (Zed, 2004) Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai literatur primer dan sekunder untuk meminimalkan bias interpretatif tunggal. (Sugiyono, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Filosofis: Dekonstruksi Dikotomi Ilmu dan Reaktualisasi Ijtihad

Implikasi paling fundamental dari Pan-Islamisme al-Afghani terhadap pendidikan Islam terletak pada penolakannya terhadap dikotomi tegas antara ilmu agama (ulum al-din) dan ilmu umum (ulum al-'aqliyyah). Al-Afghani secara terbuka mengkritik sistem pendidikan tradisional yang menempatkan studi keagamaan dalam format kaku tanpa ruang bagi perkembangan sains dan teknologi, dan ia mendorong umat Islam untuk membuka diri terhadap pengetahuan modern tanpa kehilangan kerangka nilai keislaman. (Ofiani & Mardalena, 2024).

Pandangan ini memiliki konsekuensi epistemologis yang jauh lebih luas daripada sekadar penambahan mata pelajaran sains ke dalam kurikulum madrasah. Secara filosofis, ia menggeser paradigma pendidikan Islam dari model *transmisi pasif* atas warisan keilmuan klasik menuju model *konstruksi aktif* pengetahuan melalui penalaran dan pengujian rasional, sejalan dengan reaktualisasi ijtihad yang ia gagas sebagai metode merespons stagnasi pemikiran keagamaan. (Shofi, Alfi, & Badi'ati, 2020) Implikasinya, kurikulum pendidikan Islam dituntut tidak lagi memosisikan peserta didik sebagai penghafal teks, melainkan sebagai subjek yang dilatih berargumentasi, menalar sebab-akibat, dan menafsirkan ulang khazanah keagamaan sesuai konteks zaman.

Aspek ini diperkuat oleh telaah Shofi dkk. terhadap pemikiran al-Afghani mengenai qadha dan qadar, yang menafsirkan ulang konsep takdir sebagai hubungan kausalitas (sebab-akibat) alih-alih fatalisme pasif. (Shofi, Alfi, & Badi'ati, 2020) Reinterpretasi teologis semacam ini berimplikasi langsung pada pendidikan akhlak dan etos belajar: peserta didik didorong untuk memahami bahwa keberhasilan maupun kegagalan merupakan hasil dari ikhtiar dan proses kausal yang dapat dipelajari, bukan ketetapan tak tergugat yang melemahkan motivasi berusaha.

Namun demikian, perlu dicatat secara kritis bahwa gagasan dekonstruksi dikotomi ilmu ini tidak serta merta menghasilkan model pendidikan yang sepenuhnya koheren dalam praktiknya. Al-Afghani sendiri tidak mewariskan blue print kurikulum yang sistematis, gagasannya lebih banyak berbentuk kritik dan orasi ketimbang rancangan teknis-pedagogis. (Keddie, 1968) Kekosongan inilah yang kemudian diisi secara berbeda-beda oleh murid dan penerus pemikirannya di berbagai konteks kelembagaan, sebagaimana diuraikan pada subbagian berikut.

Implikasi Kelembagaan: Jejak Pembaruan dari Mesir hingga Hindia Belanda

Pada level kelembagaan, pengaruh Pan-Islamisme dan visi pendidikan al-Afghani paling jelas terlihat melalui muridnya, Muhammad Abduh, yang melanjutkan proyek reformasi

pendidikan di Mesir, termasuk pembaruan kurikulum dan metode pengajaran di lingkungan Al-Azhar serta lembaga-lembaga pendidikan modern lainnya. (Miswanto, Hitami, & Murhayati, 2023) Miswanto dkk. mencatat bahwa kolaborasi gagasan al-Afghani dan Abduh menghasilkan model pembaruan yang menekankan integrasi ilmu agama dengan ilmu kealaman serta penataan ulang metode pengajaran dari pendekatan hafalan menuju pemahaman. (Miswanto, Hitami, & Murhayati, 2023).

Pengaruh ini juga merambah ke Asia Tenggara. Penelitian Mahardika menunjukkan bahwa pemikiran al-Afghani turut memengaruhi pembentukan kesadaran keislaman modern yang mewarnai lahirnya organisasi-organisasi Islam di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, termasuk Sarekat Islam dan Muhammadiyah, yang keduanya memberi perhatian besar pada pembaruan pendidikan sebagai instrumen kebangkitan umat. (Mahardika, 2023) Dalam konteks kelembagaan pendidikan Muhammadiyah, gagasan integrasi ilmu agama dan ilmu umum yang dirintis K.H. Ahmad Dahlan memiliki kemiripan struktural dengan visi pembaruan pendidikan al-Afghani, meskipun jalur transmisi pemikiran tersebut berlangsung tidak langsung dan termediasi oleh jaringan ulama pembaru di Mekkah dan Kairo. (Mahardika, 2023).

Selain itu, kajian Wildany, Adan, dan Akbar mengaitkan Pan-Islamisme al-Afghani dengan dinamika penerapan syariat Islam di Aceh, menunjukkan bahwa nilai ukhuwah islamiyah dan persatuan pemahaman keagamaan yang digagas al-Afghani direplikasi meski dalam skala dan konteks berbeda dalam upaya unifikasi pemahaman keagamaan di tingkat lokal. (Wildany, Adan, & Akbar, 2023) Temuan ini memperlihatkan bahwa resepsi Pan-Islamisme di Nusantara bersifat selektif dan terkontekstualisasi, aspek solidaritas dan pembaruan epistemik diterima secara luas, sementara aspek pan-politik lintas negara yang menjadi inti gagasan al-Afghani relatif tidak diterapkan secara harfiah.

Pola resepsi yang selektif ini juga ditemukan dalam kajian Zahra dan Fatimah tentang pengaruh Pan-Islamisme terhadap perkembangan partai politik berbasis Islam di Indonesia, yang menggarisbawahi bahwa unsur paling bertahan dari warisan al-Afghani bukanlah cita-cita kekhalifahan transnasional, melainkan etos pembaruan pemikiran dan penolakan terhadap pemisahan agama dari urusan publik, termasuk urusan pendidikan. (Zahra & Fatimah, 2023).

Implikasi Kurikuler: Dari Hafalan Menuju Berpikir Kritis dan Solidaritas Inklusi

Pada level kurikuler, implikasi paling operasional dari pemikiran al-Afghani adalah pergeseran orientasi pembelajaran dari penguasaan teks secara verbatim menuju pengembangan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan praktis. (Ofiani & Mardalena, 2024) Orientasi ini sejala dengan teori pendidikan kontemporer yang menekankan *deep*

learning atau pembelajaran bermakna, yakni proses belajar yang menumbuhkan transfer pemahaman lintas konteks, bukan sekadar reproduksi informasi. (Dzulfiqar & Miskiyah, 2026). Implikasi kedua adalah penguatan kurikulum kewargaan global-keislaman (*transnational civic curriculum*) yang menumbuhkan kesadaran ukhuwah islamiyah tanpa terjebak eksklusivisme sektarian. Hal ini relevan dengan pandangan al-Afghani bahwa solidaritas Islam dimaksudkan untuk memperkuat dialog antarumat beragama dan melawan ekstremisme, bukan untuk menumbuhkan permusuhan terhadap pihak luar. (Politea, 2023) Dalam praktik kurikuler kontemporer, prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam muatan pendidikan moderasi beragama (*wasathiyyah*) yang menempatkan nilai *i'tidal* (keseimbangan) dan *tasamuh* (toleransi) sebagai kompetensi inti, sejalan dengan rumusan konseptual Politea yang menafsirkan ulang Pan-Islamisme al-Afghani dalam bingkai moderasi Islam kontemporer. (Politea, 2023).

Implikasi ketiga adalah penekanan pada keterampilan praktis dan kecakapan hidup (*life skills*) sebagai pelengkap penguasaan pengetahuan teoretis, sebuah gagasan yang selaras dengan tuntutan al-Afghani agar umat Islam tidak hanya unggul secara wacana keagamaan tetapi juga mampu bersaing dalam bidang sains dan teknologi guna keluar dari ketertinggalan struktural terhadap bangsa-bangsa Barat. (Hakim, 2024).

Analisis Kritis: Ketegangan dan Keterbatasan Pan-Islamisme sebagai Basis Pendidikan

Meskipun Pan-Islamisme al-Afghani menyimpan potensi pedagogis yang substansial, kajian ini menemukan setidaknya tiga ketegangan konseptual yang perlu dicermati secara kritis dan objektif. Ketegangan pertama adalah antara orientasi rasional-modernis dan retorika solidaritas keagamaan yang emosional-mobilisatif. Karena Pan-Islamisme dirumuskan dalam konteks perjuangan politik anti-kolonial, narasinya kerap menggunakan bahasa persatuan yang menekankan identitas keagamaan secara kuat, sehingga rentan ditafsirkan secara reduktif oleh kelompok yang kurang memperhatikan basis rasionalitas dan keterbukaan *ijtihad* yang justru menjadi inti pemikiran al-Afghani. (Black, 2006) Hal ini menjelaskan mengapa warisan al-Afghani dapat dirujuk baik oleh kalangan modernis-rasionalis maupun oleh kalangan yang berorientasi lebih konservatif atau fundamentalis, sebuah ambivalensi yang menuntut pembaca kontemporer untuk membedakan secara jernih antara metode (*ijtihad*, rasionalitas) dan retorika (solidaritas, persatuan) dalam pemikirannya.

Ketegangan kedua terletak pada absennya kerangka kelembagaan dan kurikuler yang sistematis dalam karya-karya al-Afghani sendiri. Sebagai seorang agitator politik dan orator ulung, al-Afghani lebih banyak menyampaikan kritik dan visi besar ketimbang merumuskan desain teknis pendidikan, sehingga implementasi gagasannya sangat bergantung pada

interpretasi para penerusnya yang tidak selalu konsisten satu sama lain. (Keddie, 1968) Konsekuensinya, mengklaim adanya "model pendidikan al-Afghani" yang tunggal dan koheren berisiko melakukan generalisasi berlebihan terhadap sebuah korpus pemikiran yang sesungguhnya bersifat fragmentaris dan kontekstual.

Ketegangan ketiga menyangkut relevansi gagasan persatuan transnasional di tengah realitas negara-bangsa modern yang menjunjung kedaulatan teritorial. Cita-cita Pan-Islamisme sebagai solidaritas politik lintas negara secara historis terbukti sulit diwujudkan secara institusional, dan resepsinya di berbagai negara termasuk Indonesia cenderung mengalami transformasi menjadi nilai solidaritas kultural-keagamaan yang lebih longgar ketimbang proyek politik yang utuh. (Salman & Hadi, 2022) Implikasinya bagi pendidikan Islam kontemporer adalah perlunya kehati-hatian dalam merumuskan kurikulum bertema persatuan umat agar tidak terjebak pada romantisme historis yang melepaskan diri dari konteks kebangsaan dan kewarganegaraan yang berlaku saat ini.

Dengan mempertimbangkan ketiga ketegangan tersebut, kajian ini berpendapat bahwa kontribusi paling bertahan dan paling layak diwariskan dari Pan-Islamisme al-Afghani bagi pendidikan Islam bukanlah cita-cita unifikasi politik transnasional, melainkan etos epistemik pembaruannya: keberanian mempertanyakan kemandekan, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern, dan penekanan pada penalaran kritis sebagai jalan keluar dari stagnasi peradaban. Pembacaan kontemporer terhadap al-Afghani sepatutnya bersifat selektif-kritis, mengambil etos pembaruannya tanpa secara naif mereproduksi retorika solidaritas yang berpotensi disalahgunakan secara eksklusivistik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembaruan pendidikan Islam pada tiga tataran. Pada tataran filosofis, gagasan tersebut mendekonstruksi dikotomi ilmu agama dan ilmu umum melalui reaktualisasi ijtihad sebagai metode epistemologis. Pada tataran kelembagaan, gagasan tersebut menjadi inspirasi bagi pembaruan pendidikan di Mesir melalui Muhammad Abduh, serta turut mewarnai lahirnya kesadaran pendidikan modern di Hindia Belanda melalui jaringan organisasi Islam seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Pada tataran kurikuler, gagasan tersebut mendorong pergeseran orientasi pembelajaran dari hafalan menuju penalaran kritis, keterampilan praktis, dan kesadaran solidaritas inklusif yang relevan dengan pendidikan moderasi beragama kontemporer.

Meskipun demikian, kajian ini juga menemukan ketegangan konseptual antara orientasi rasional-modernis dan retorika solidaritas emosional, absennya kerangka kelembagaan yang sistematis dalam pemikiran al-Afghani sendiri, serta keterbatasan relevansi cita-cita persatuan transnasional di tengah realitas negara-bangsa modern. Oleh karena itu, relevansi Pan-Islamisme bagi pendidikan Islam kontemporer hendaknya dipahami secara selektif-kritis, dengan menekankan etos pembaruan epistemik keterbukaan, rasionalitas, dan keberanian ijtihad ketimbang romantisme persatuan politik transnasional yang secara historis terbukti sulit terwujud secara institusional.

Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan kajian komparatif antara model pendidikan yang diilhami al-Afghani dengan model pembaruan pendidikan Islam kontemporer lainnya, serta melakukan penelitian lapangan (field research) pada lembaga pendidikan yang secara eksplisit mengklaim mewarisi tradisi pembaruan ini, guna menguji sejauh mana etos epistemik tersebut benar-benar terimplementasi dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, R. (1993). *Jamal al-Din al-Afghani: His life and his mission*. Islamic Book Trust.
- Black, A. (2006). *The history of Islamic political thought: From the Prophet to the present*. Edinburgh University Press.
- Budiarti, L., Sefira, R., & Azzahra, H. (2026). Rasionalisme dan kebangkitan umat Islam dalam pemikiran Jamaluddin al-Afghani. *Al-Mashadir: Journal of Quranic Sciences and Tafsir*, 2(1), 222–232.
- Dzulfiqar, A. S., & Miskiyah, A. Z. (2026). Analisis literatur: Pendekatan pembelajaran deep learning dalam pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 9–18.
- Hakim, T. M. (2024). Jamaluddin Al-Afghani's thoughts on Islamic education. *Amandemen: Journal of Learning, Teaching and Educational Studies*, 2(1), 14–24.
- Hamka. (1981). *Said Jamaluddin al-Afghani* (2nd ed.). Bulan Bintang.
- Keddie, N. R. (1968). Islamic philosophy and Islamic modernism: The case of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani. *Iran*, 6(1), 53–56.
<https://doi.org/10.1080/05786967.1968.11834440>
- Keddie, N. R. (1972). *Sayyid Jamal ad-Din "al-Afghani": A political biography*. University of California Press.
- Mahardika, M. D. G. (2023). Jamaluddin Al-Afghani's thoughts in Sarekat Islam and Muhammadiyah movement in the early 20th century. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13(2).
- Maryam. (2014). Pemikiran politik Jamaluddin al-Afghani: Respons terhadap masa modern dan kemunduran dunia Islam. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2).

- Miswanto, Hitami, M., & Murhayati, S. (2023). Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani: Aspek-aspek pembaruan dan reformasi pendidikan. *Jurnal Arriyadhah*, 20(1), 12–20.
- Nasbi, I. (2019). Jamaluddin Al-Afghani: Pan-Islamisme dan ide lainnya. *Jurnal Diskursus Islam*, 7(1), 70–79. <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i1.9805>
- Ofiani, O., & Mardalena. (2024). Relevansi pemikiran pendidikan Jamaluddin Al-Afgani dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 11(1), 1–24. <https://doi.org/10.51311/nuris.v11i1.552>
- Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam. (2023). Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dalam bingkai moderasi Islam. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*.
- Salman, A. K., & Hadi, N. (2022). Pengaruh Pan-Islamisme bagi Kekhilafahan Turki Utsmani pada masa Sultan Abdul Hamid II. *TANJAK: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, 2(2), 181–204.
- Shofi, A., Alf, M., & Badi'ati, Q. (2020). Pemikiran qada-qadar Jamal ad-Din al-Afghani dan implikasinya terhadap pemikiran dakwah 'aqlaniyah. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 18(1), 1–28.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wildany, N., Adan, H. Y., & Akbar, H. (2023). Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dan relevansinya dengan penerapan syari'at Islam di Aceh. *As-Siyadah*, 2(1), 41–55. <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v2i1.2652>
- Zahra, N., & Fatimah, F. (2023). Konsep Pan-Islamisme menurut pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dalam perkembangan partai politik di Indonesia. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 228. <https://doi.org/10.29210/1202322802>
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.